

ORIENTASI HUMANISME PENDIDIKAN ISLAM DAN MASA DEPAN KEMANUSIAAN

Mukodi
M. Mukhlis Fahrudin

Dosen STKIP PGRI Pacitan dan
Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
E-mail: lppm_kampuspendidik@yahoo.co.id

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, meneliti dan mengumpulkan buku-buku yang berisi teori, pendapat atau pandangan para pakar yang terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitik, metode penalaran dan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) kekerasan (dehumanisasi) dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik; 2) kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku; 3) kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media; 4) kekerasan dibidang pendidikan juga merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution, maupun jalan pintas; 5) tingginya jurang perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, juga menjadi penentu dalam praktik kekerasan dibidang pendidikan.

Kata Kunci: humanisme pendidikan, pendidikan Islam dan kemanusiaan.

Dehumanisasi atau krisis kemanusiaan merupakan satu masalah mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan saat ini tidak lagi menghormati dan menghargai martabat manusia dan segala hak asasinya. Akibatnya, melalui proses pendidikan peserta didik tidak tumbuh sebagai subyek yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Mereka justru menjadi

korban dalam sebuah sistem yang memaksa mereka mengikuti aturan dalam sistem tersebut. Terjadinya dehumanisasi pendidikan di hampir semua jenjang pendidikan, dikarenakan orientasi pendidikan sudah menjadi komoditas atau kepentingan bisnis semata. Kondisi itu menyebabkan proses pembelajaran tidak hanya menjadikan guru sebagai pengajar,

tetapi ia juga mengedepankan nilai kuantitas ketimbang nilai-nilai kemanusiaan. Dehumanisasi pendidikan saat ini pun cenderung mengarah pada kekerasan dan degradasi moral.

Padahal, pada masa Kementrian Pendidikan--dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan--diera (alm) Fuad Hassan, titik tekan pendidikan adalah pendidikan yang humanis, misalnya jika para orang tua mempunyai anak yang berbakat dan berasal dari kalangan miskin, ia masih dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan. Namun, ketika terjadi pergolakan, khususnya setelah era reformasi, dehumanisasi pendidikan pun menjadi panglima. Bahkan, pendidikan seolah sudah menjadi komoditas bisnis. Alih kata, komersialisasi pendidikan sudah mulai mengakar. Ini terjadi di hampir semua institusi pendidikan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat dari kalangan ekonomi bawah harus putus sekolah. Data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Setiap tahun sekitar 211.643 siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau MTs di berbagai pelosok Tanah Air putus sekolah karena sejumlah faktor.

Selain itu, sekitar 452.000 tamatan SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pencapaian rata-rata angka partisipasi kasar di jenjang SMP/MTs secara nasional 2009/2010 mencapai 98,11 persen atau di atas target 95 persen. Artinya, masih ada

sekitar 1,89 persen penduduk usia SMP yang tidak sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah siswa SMP sederajat sekitar 12 juta siswa (Mukodi, 2011: 23). Praktis, hanya segelintir orang dari kalangan mampu saja yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Walau harus diakui, masih ada kebijakan dilevel perguruan tinggi yang memihak rakyat miskin, tapi jumlahnya tidak banyak.

Di sisi lain, akibat dari kecenderungan pendidikan menjadi komoditas atau kepentingan bisnis, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini pun sering berubah, yakni lebih mengedepankan aspek kuantitas ketimbang nilai-nilai humanisme (Wawan Budayawan, 2008). Tak terbantahkan, bahwa dunia pendidikan kita acapkali diwarnai dengan kekerasan. Belum lagi hilang dari ingatan kita, pelbagai kasus *smack down* ala siswa, pemukulan dan penganiayaan oknum "guru" terhadap peserta didiknya. Bahkan kematian sejumlah mahasiswa IPDN, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan senioritas terhadap juniornya. Kini kita kembali dikejutkan dengan kejadian serupa, yaitu "guru" memukuli peserta didiknya. Kejadian ini berlangsung di Jambi. Disinyalir pemukulan ini terjadi, akibat si anak tidak bisa mengerjakan tugas matematika dari sang guru (Baca: mukodi, 2011: 37).

Paradoksal memang dunia persekolahan di Indonesia, humanisme pendidikan masih sulit dipraktikkan. Padahal, mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal, secara historis Islam pada hakikatnya sangat anti terhadap

kapitalisme dan kekerasan. Kini Islam di dunia dan khususnya di Negara Indonesia ditantang oleh imperialisme 'gaya baru'. Imperialisme yang masuk ke ranah kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai sudah membuat kesenjangan sosial yang semakin besar. Allah SWT secara terang-terangan melarang hambanya untuk mengeksploitasi, memonopoli (ihtikār) yang termaktub dalam Q.S 17: 6-8, Q.S 7: 31, dan masih banyak lagi ayat yang lainnya.

Agama Islam sendiri justru mengajarkan prinsip keadilan (Q.S 7: 29) dan membela kaum lemah (Q.S 17:16), dan masih banyak ayat yang menjabarkan tentang perintah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena pada dasarnya dalil ini ada untuk kesejahteraan Amat. Seperti halnya dalam potongan ayat Al Qur'an yang berbunyi: *Udkhulu fi salmi kaffah* (masuklah dalam kesejahteraan yang menyeluruh). Di dalam kesejahteraan menyeluruh ini dimaksudkan memiliki aspek teologis dan humanis. Dalam konteks itu, kajian ini akan difokuskan pada orientasi humanis pendidikan. Harapannya, bisa membuka ruang dialektika pemikiran untuk mengurai benang kusut kekerasan dibidang pendidikan.

METODE

Sebuah kajian dalam suatu penelitian memerlukan standar ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melacak data penulis menjelaskan dan menyimpulkan obyek bahasan dengan menggunakan sebuah metode. Jenis penelitian ini

merupakan kajian kepustakaan (*library research*) artinya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, makalah, jurnal, majalah dan sumber lain yang koheren dengan obyek bahasan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek kajian lalu menganalisis bahasan penelitian. Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari relevansi atau titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari primer dan sekunder. Data primer berupa buku-buku humanisme pendidikan Islam. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah dan sumber-sumber lainn yang terkait.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan informasi yang segaris lurus dengan obyek bahasan guna mendapatkan konsep yang utuh (Bisri, 1998: 61). Sedangkan analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian guna menghasilkan suatu kesimpulan yang konkret dari hasil telaahan (Suryabrata, 1998: 85). Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi. Ada tiga syarat *content analysis*, yaitu: obyektivitas, sistematis dan generalisasi. Analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan

generalisasi, artinya temuannya harus mempunyai sumbangan teoritik (Noeng Muhajir, 1998: 48).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Humanisme sebagai gerakan kemanusiaan telah mengalami proses penafsiran dan penurunan kata yang panjang. Secara etimologis, istilah humanisme erat kaitannya dengan kata Latin klasik, yakni *humus*, yang berarti tanah atau bumi. Dari istilah tersebut, muncul kata *homo* yang berarti manusia (makhluk bumi) dan *humanus* yang lebih menunjukkan sifat “membumi” dan “manusiawi”. Istilah yang senada dengannya adalah kata latin “*humilis*”, yang berarti kesederhanaan dan kerendahan hati (kesehajaan). Lawan dari pemaknaan istilah itu, pada awalnya, adalah makhluk ciptaan lainnya yang bukan manusia (binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan) dan termasuk pula tatanan segala yang ada, makhluk luar angkasa dan dewasa (*deus/divus, divinus*). Perspektif etimologis dan historis dalam memahami makna kata humanisme di atas menunjukkan bahwa inti persoalannya adalah *humanus* atau manusia itu sendiri. Artinya, bagaimana membentuk manusia (*humanus*) itu menjadi lebih manusiawi (melalui *humanismus*) (Bambang Suharto, 2008: 2-3). Jadi, jika kata humanis disandingkan dengan kata pendidikan, maka mengandung arti pendidikan yang memanusiakan manusia, atau pendidikan yang penuhkesehajaan.

Sayangnya, praktik pendidikan yang humanis di Indonesia sulit dilaksanakan. Hasil kajian dari berbagai sumber ditemukan bahwa kisah duka dunia pendidikan terus-menerus kembali berulang. Jumat (15/7) petang lalu, penduduk Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikagetkan dengan peristiwa bunuh diri seorang siswi SMP 10 Bantar Gebang. Vivi Kusri nekat mengakhiri hidup dengan menggantung diri memakai seutas tali di kamar mandi rumahnya. Menurut penuturan sang Ayah, mungkin alasan Vivi gantung diri karena malu sering diejek teman sekolahnya sebagai anak tukang bubur. Apalagi menjelang tahun ajaran baru ini Vivi belum punya seragam sekolah (liputan6.com, 16/07/2005). NES (14 tahun), siswa kelas II SMP Muhammadiyah Playen, Gunung Kidul DIY nekat mencoba bunuh diri. Tindakannya dipicu perasaan malu lantaran yang bersangkutan belum melunasi biaya karyawisata yang diadakan pihak sekolah ke Cilacap Jawa Tengah. Meski NES akhirnya bisa tertolong dan menyesali perbuatannya, namun ia memilih akan keluar dari sekolah lantaran masih diliputi rasa malu (KR, 25 Mei 2007).

Kisah bunuh diri juga pernah dilakukan oleh seorang siswa hanya karena seragam pramukanya basah dan ia takut masuk sekolah. Sebelumnya juga pernah ada kisah bunuh diri yang dilakukan oleh anak di Jawa barat. Saat itu anak yang berinisial H malu dan tertekan karena tidak mampu membayar uang ekstra kurikuler yang besarnya tak lebih dari Rp.5000. Jiwa H memang bisa diselamatkan, namun ia pun tak bisa

kembali lagi normal seperti sediakala (KR, 29 Mei 2007). Tak hanya itu, seorang siswa SMP asal Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Diduga, remaja bernama Tekad (14) itu mengalami stres karena ketahuan menyontek di sekolah. Kasus bunuh diri remaja yang juga peserta didik kelas dua sebuah SMP di Kecamatan Kras ini terjadi di rumahnya, Desa/Kecamatan Kras, Senin pagi. Korban pertama kali ditemukan kakaknya yang bernama Heru saat akan mandi. Dalam perjalanan menuju kamar mandi, ia menemukan adiknya sudah dalam keadaan tergantung (20/12/2010). Bahkan berdasar data statistik 2011 frekuensi kasus bunuh diri dikalangan peserta didik semakin meningkat (Mukodi, 2011: 18).

Dalam konteks itu, marginalisasi dan ketidakadilan dalam pendidikan mestinya ditangkap para pembuat kebijakan dalam pendidikan sebagai ancaman yang amat serius. Mereka akan berpandangan bahwa pemerintah memang tidak mengusahakan suatu pendidikan yang serius untuknya. Pemerintah dengan logika kapitalisnya hanya berpihak kepada mereka yang mempunyai modal dan mampu unjuk gigi dalam beragam percaturan internasional. Pendidikan memang sasaran empuk dikomoditaskan secara politik. Ketika musim kampanye isu pendidikan dijadikan bahan penarik simpati. Pendidikan gratis atau murah kerap diwacanakan namun tidak pernah menjadi kenyataan. Selalu ada cara membebani peserta didik dan orang tuanya dengan aneka

pungutan, karena baik negeri dan swasta sudah terbangun *image* pendidikan yang bagus adalah yang mahal.

Peserta didik telah menjadi obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri dan bisnis. Salah satu contoh paling nyata adalah asumsi bahwa apa yang diajarkan jauh lebih penting dari siapa yang diajar. Prestasi guru juga diukur dari nilai yang didapat peserta didiknya. Guru sebagai pendidik tidak mampu menghentikan dehumanisasi ini karena guru sendiri terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional. Guru pada lembaga pendidikan Islam, guru ngaji/agama hanya digaji sedikit dengan kata-kata penghipnotis “yang sabar semoga amal ibadah diterima dan pahala melipat dari amal jariyah, *isyaallah* masuk surga”. Potret yang paling telanjang para guru tengah mengalami belenggu kemiskinan, finansial, intelektual, emosional, kultural dan spiritual (Anita Lie, Harian Surya, 15 Februari 2008). Akibatnya, semakin menjadi kebiasaan guru yang bekerja sampingan sehingga tugas utamanya sebagai pendidik terlupakan, jarang membaca dan belajar, karena terbebani urusan administrasi, cenderung berlaku kasar dan mengumpat, sering melampiaskan kekesalan kepada peserta didik dan pada akhirnya kehilangan identitas dan integritas.

Ironis lagi, sekarang sulit dijumpai guru yang (humanis) mengajar dengan cinta kasih. Guru yang memberikan sepenuh waktu dan hidupnya untuk kesejahteraan hidup peserta didiknya. Guru yang merasa gembira ketika peserta

didiknya berhasil dan guru yang merasa bersedih ketika menyaksikan peserta didiknya gagal dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Guru-guru yang demikian hanya akan lahir dalam suasana pembentukan yang memang mengedepankan aspek pemanusiaan dan pembudayaan. Karena itu mesti dicatat, pekerjaan sebagai guru tidak sama dengan bekerja di pabrik. Menjadi guru adalah membentuk manusia. Ia menggantikan peran orang tua yang menyerahkan seluruh tanggung jawab sosialnya kepada sekolah untuk dibentuk dan diarahkan. Ketika guru lupa menyadari tanggung jawab sosial nan berat ini dapat ditebak, arah pendidikan dan pembentukan kian samar-samar dan kabur.

Sayangnya, pekerjaan sebagai guru tak lagi sebuah panggilan hati nurani. Padahal motivasi sosial inilah yang pertama-tama menggerakkan seseorang menjadi guru. Penelitian Martin Handoko (2008: 16) yang meneliti anak-anak pedesaan yang masuk ke SPG Van Lith Muntilan untuk menjadi guru, pertama-tama menempatkan panggilan sebagai motivasi utama mengapa mereka ingin menjadi guru. Kemudian disusul dengan keinginan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya yang biasanya amat miskin di pedesaan. Menjadi guru merupakan pekerjaan yang mampu mereka raih dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang miskin. Dengan demikian, mereka bisa memperbaiki keadaan dibanding orang tua mereka yang hanya hidup sangat sederhana sebagai petani.

Gejala dehumanisasi ini berawal dari ketakutan yang tercipta

dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Guru sudah terposisikan sebagai perangkat dan sistem yang tidak cukup memberikan penghargaan bagi upaya pembaruan, namun justru sangat menghargai tindakan pengukuhan aturan dan sistem. Cermin yang menonjol adalah guru sebagai inovator dan pelopor perubahan di sekolah lebih suka dengan hal-hal yang bersifat seremonial dan rutin ketimbang mengadakan perubahan yang sifatnya mendasar. Sertifikasi guru yang menjanjikan pemberian insentif dan perubahan kesejahteraan disambut dengan gegap gempita di kalangan para guru. Tragisnya, ia tidak peduli bahwa tindakannya acapkali diwarnai kecurangan. Misalnya, dalam memenuhi dokumen portofolio, dan dokumen lainnya. Lebih dari itu, stres berkepanjangan dan terlalu sibuk dengan urusan sertifikasi, tidak sedikit guru melupakan tugas utamanya sebagai pendidik. Sekali lagi, guru begitu bersemangat jika perubahan itu untuk dirinya sendiri, sementara jika perubahan itu demi kemajuan persekolahan dan peserta didik respon mereka “setengah hati”.

Di sisi yang sama, ketakutan guru terjadi secara multidimensional. Ketakutan terhadap sistem dengan segala perangkatnya, termasuk evaluasi terhadap peserta didik berupa ujian yang diselenggarakan lembaga yang berkuasa, pengakuan atas profesionalitasnya berupa program sertifikasi maupun penilaian kerja yang buruk dari kepala sekolah telah menghambat dirinya berkembang menjadi guru yang utuh. Profesi guru merupakan panggilan. Betapapun berat pergumulan untuk

memperjuangkan tingkat kesejahteraan, yang membedakan guru sejati dari yang tidak adalah bagaimana mereka masing-masing memaknai profesi keguruannya. Yang satu menjalaninya sebagai panggilan hidup, yang lainnya motifnya mencari nafkah. Namun penting dicatat, begitu besarnya tanggung jawab sosial guru sebagai pendidik, mereka tidak bisa ditempatkan sebagai “tukang” (Martin Handoko, <http://bruderfic.or.id/>, 16 April 2008).

Pembahasan

Berpijak dari hasil kajian tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa belakangan ini ada indikasi pendidikan persekolahan di Indonesia mengarah pada dehumanisasi. Indikasinya, perkelahian peserta didik berkembang pesat, peserta didik lebih mengedepankan budaya kekerasan daripada budaya kesahajaan dan persaudaraan, peserta didik lebih cepat frustrasi dan emosional. Dalam konteks itu, penulis menggunakan analisisnya Abdurrahman Assegaf (2006: 3) yang mengategorikan persoalan tersebut ke dalam lima ranah, yaitu: Pertama, kekerasan (dehumanisasi) dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Tawuran antar pelajar atau mahasiswa

merupakan contoh kekerasan ini. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Misalnya, siswa mbolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat hiburan.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas. Dan, kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Salah satu alternatif solutif dari persoalan tersebut,--dalam konteks yang sempit di dunia persekolahan Islam--dengan merubah paradigma dunia persekolahan kita. Matthew F. Moes dalam penelitiannya berjudul, “*Creating Islamic Culture in Muslim Schools*” mengemukakan bahwa dalam membangun transformasi sekolah-sekolah Islam salah satu tugas yang paling praktis ke depan adalah menerapkan budaya Islam, rencana perubahan sosial, dan praktik pendidikan Islam klasik ke

pendidikan Islam modern. Salah satu cara ini dapat terjadi, jika para pengelola sekolah (Islam) sadar akan domain wewenangnya dan pengaruh unsur-unsur budaya di sekolah mereka dan mulai membuat keputusan dengan penuh tanggungjawab dengan menggunakan kekuatan yang ada demi kepentingan sekolah terbaik.

... Transforming current Islamic schools: One of the most practical tasks ahead is to apply what we know about culture, planned social change, and classical Islamic education to the existing Islamic schools. One of the ways this can occur is for Muslim school administrators to become aware of the full scope and influence of the elements of culture in their school and begin making conscious decisions about how to use this power in the school's best interest... (Matthew F. Moes, 2009: 31).

Dalam konteks itu, harus dipahami bahwa budaya pendidikan Islam adalah budaya kebebasan berpendapat, menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, dan memandang manusia satu dengan lainnya sama disisi-Nya (Q.S. Al-Kafirun, 6). Rencana perubahan budaya yang dimaksud adalah terwujudnya iklim budaya terbuka yang mengarah pada budaya iklim akademik. Sedangkan paradigma pendidikan Islam klasik ke pendidikan modern merupakan konsekuensi logis dari perkembangan pendidikan. Jelasnya, apapun bentuk pendidikannya, dehumanisasi (kekerasan) dalam

pendidikan harus dicegah. Karena dehumanisasi itu ada pangkal persoalannya, maka untuk menghentikannya pun harus dengan cara memangkas akar pemicunya. Tindak dehumanisasi dalam pendidikan yang tidak terselesaikan dapat merambah dan menambah daftar ketidak-humanisan dalam pendidikan. Untuk mencegahnya, norma agama, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan perlu ditanamkan dalam diri seseorang melalui pendidikan nilai (afektif) yang humanis. Norma agama (Islam) amat berarti dalam membersihkan kesadaran kemanusiaan; kasih sayang, pemaaf, saling menolong, mengutamakan perdamaian, bukan kekerasan serta pengerusakan menghormati hak orang lain, tidak mencela dan menghina, mencuri atau bahkan saling membunuh (QS. 48: 29, QS. 2: 37, QS. 30: 5, QS. 2: 187, QS. 3: 152 dan 155, QS. 24:22, QS. 5: 2). Pendek kata, ajaran Islam sarat dengan pendidikan afektif dan humanis, dan karenanya dapat digunakan sebagai alternatif solusi bagi upaya menghentikan perilaku kekerasan dan perilaku-perilaku dehumanisasi lainnya dalam pendidikan.

PENDIDIKAN HUMANIS DAN MASA DEPAN MANUSIA

Hubungan manusia dengan pendidikan memang tak dapat dipisahkan, karena perkembangan manusia itu sendiri sangat tergantung dari pendidikan yang diterimanya. Tidak hanya itu saja, kehidupan manusia tanpa pendidikan akan menjadikan manusia tidak akan mampu berkembang dengan baik, dan jika hal itu terjadi maka

eksistensi manusia di muka bumi ini tentulah tidak mempunyai makna. Karena semua potensi yang dimilikinya seperti *al-qalb*, *al-ruh*, dan *al-aql (intelegensia)* tidak akan pernah mengalami perkembangan. Manusia juga merupakan makhluk biologis yang senantiasa tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani, dalam proses perkembangan dan pertumbuhan tersebut peranan pendidikan sangat diperlukan, pendidikan diibaratkan sebagai wadah untuk menjembatani segala potensi yang ada dalam diri manusia tersebut. Di samping itu, pendidikan juga merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia, selain dapat membentuk kepribadian seseorang juga dapat menentukan status seseorang dalam masyarakat. Secara signifikan memang ada perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, dan Islam sangat menghargainya (QS. al-Mujādilah/58: 11). Bahkan Islam menyamakan orang yang tidak berilmu dengan keledai yang membawa kitab atau buku di punggungnya, tetapi ia tidak pernah mengetahui dan memahami apa yang ada didalamnya (QS. al-Jumu'ah/62: 5). Praktis, pendidikan menjadi kekuatan bagi manusia untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

Lebih dari itu, pendidikan sangat urgen bagi kepentingan manusia itu sendiri. Karena tujuan pendidikan adalah untuk mencapai pertumbuhan seimbang dalam kepribadian manusia secara total. Melalui latihan, semangat, rasional, perasaan dan kepekaan, dan pengembangan segala potensi yang terkandung dalam dirinya. Sebab secara kodrati manusia

mempunyai pendidikan, karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa manusia dilahirkan dengan membawa fitrah. Fitrah ini berisi potensi yang perlu dikembangkan, namun dia butuh bimbingan dari orang lain untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, sehingga potensi tersebut bisa berkembang secara positif (Mukodi, 2010: 31). Dasar kodrati seperti inilah yang menjadi landasan bagi manusia untuk memperoleh pendidikan. Tidak heran kalau Islam menempatkan pendidikan sesuatu yang paling utama dalam doktrinnya. Hal ini bisa diketahui banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi manusia.

Pada hakikatnya, manusia membutuhkan pendidikan karena manusia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang kecuali dengan pendidikan, memang manusia diberikan Allah Swt potensi bawaan, namun tanpa pendidikan potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang secara baik dan seoptimal mungkin. Pendidikan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan sebagai sarana yang paling tepat untuk menjadikan manusia lebih maju ke arah yang lebih baik serta mampu memahami hakikat dirinya. Bahkan perintah wahyu yang pertama adalah perintah untuk membaca, menghayati, *men-tadabburi*, menelaah segala yang ada di sekitar kita (QS. al-'Alaq/96: 1-5).

Jika, ditelaah dalam perspektif psikologis, pendidikan yang baik dapat menjadikan individu mampu mendidik dan menghaluskan perasaannya dan mengarahkannya

terhadap pengenalan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga menjauhkan dari sifat-sifat yang mengantarkan manusia untuk melakukan penindasan terhadap manusia lainnya (*exploitation de l'homme par l'homme*). Dengan pendidikan yang baik, memberikan modal bagi individu untuk menghadapi kehidupan ini tanpa adanya pengekangan dan pemonjaraan kreativitas. Pendidikan yang memberi keterampilan sebagai alat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kehidupannya.

Begitulah peranan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, karena pendidikan akan menumbuhkan segala aspek dalam kehidupan manusia, sehingga pembinaan terhadap potensi-potensi tersebut akan memunculkan sebuah inovasi dan kreativitas serta mempermudah dirinya dalam menjalani kehidupan. Di lingkungan sekitar, tentunya dapat diamati betapa bedanya orang yang mendapat pendidikan secara baik (*humanism*) dengan mereka yang tidak mendapat pendidikan. Jadi, ketika berbicara tentang kehidupan manusia, maka pada dasarnya pendidikan tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan barometer tinggi-rendahnya kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan pendidikan sangat penting bagi manusia, karena pendidikan adalah sarana untuk menjadikan manusia lebih maju ke arah yang lebih baik serta mampu memahami hakikat dirinya. Pendidikan yang baik menjadikan individu mampu mendidik dan menghaluskan

perasaannya dan menjauhkan dari sifat-sifat yang mengantarkan manusia untuk menindas (Q.S. At-tin/95: 4-5).

AGENDA HUMANISASI PENDIDIKAN DAN TANTANGAN GLOBAL

Manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan pendidikan sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati masih terus menjadi dambaan kita, ketika sosok sesungguhnya belum lagi ditemukan pada saat arus globalisasi. Memanusiakan manusia merupakan agenda utama pendidikan dan tujuan paling mendasar dari perbuatan mendidik. Jika para pendidikan dan sistem pendidikan mempunyai citra dan citra rasa mendalam mengenai manusia, maka dia dan sistem yang ada akan menjalankan proses pendidikan menuju pembentukan insan manusiawi sejati (Sudarman Danim, 2003: 12). Selanjutnya akan mampu menghadapi perubahan sekaligus berkompetisi di era globalisasi.

Bangsa kita mau tidak mau, harus siap berkompetisi dan bermitra pada percaturan global. Tilaar (H.A.R. Tilaar, 1999: 3) mengatakan masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia demokrasi sedang marak dalam masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain

berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa.

Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang penuh resiko (*risk society*) (Ulrich Beck, 2004: 16). Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan pekerjaan yang mudah, karena sangat berkaitan dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat, gelombang globalisasi dan modernitas. Masyarakat penuh resiko masa depan menuntut proses pengambilan keputusan dengan tepat. Masyarakat yang dapat mengambil keputusan dengan tepat adalah masyarakat yang terdidik, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bimbingan moral untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsanya dan dunia.

Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejak jalannya sendiri seiring dengan adanya perubahan, khususnya memasuki masa depan yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan, dan agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri (Suyanto dan Djihad Hisam, 2000: 2), maka pendidikan Islam dalam perkembangannya setidaknya didesain untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kehidupan pada masa transformasi benar-benar berada pada tingkat persaingan global yang sangat ketat. Artinya, siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas global, akan tersingkir secara alami dengan sendirinya (Suyanto dan Djihad Hisam, 2000: 2). Salah satu paradigma yang berbeda adalah paradigma di dalam aspek stabilitas

dan predikibilitas, bila pada milenium kedua orang selalu berfikir bahwa segala sesuatu itu stabil dan bisa diprediksi, pada masa ini semakin sulit untuk melihat adanya stabilitas (Djamaluddin Ancok, 1998: 2).

Agar dapat menghadapi kondisi yang semakin tidak bisa diprediksi tersebut, diperlukan kesiapan sikap mental manusia untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. Orang tidak bisa lagi bersifat reaktif, hanya menunggu dan menghindari setiap persoalan atau resiko demi resiko, dengan mempertahankan status-qua. Tetapi pada era global, orang lebih bersifat proaktif dengan memiliki toleransi atas ketidakjelasan yang terjadi akibat perubahan dengan tingkat dinamika yang tinggi. Mencermati kondisi sekarang ini apa yang perlu dilakukan, nampaknya hal yang urgen adalah kita harus menyusun langkah-langkah untuk reformasi pendidikan dan harus melepaskan diri dari paradigma lama, dikotomis, tidak demokratis, dan tidak memanusiakan manusia. Beberapa langkah-langkah reformasi pendidikan Islam untuk menyongsong humanisme-global adalah sebagai berikut: Pertama, merumuskan visi dan misi pendidikan Islam. Langkahnya, yaitu: 1) Pendidikan hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis; 2) Pendidikan hendaknya memiliki misi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi

terdidik (Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000: 8).

Kedua, isi dan substansi pendidikan nasional harus akomodatif. Caranya, yaitu; (1) Substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam totalitasnya. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar tidak semata-mata hanya mengacu pada NEM. Persoalan-persoalan yang terkait dengan paradigma baru mengenai keberhasilan seseorang perlu mendapatkan perhatian secara implementatif; 2). Substansi pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hendaknya membuka kemungkinan untuk terjadinya pengembangan individu secara vertikal dan horizontal. Pengembangan vertikal mengacu pada struktur keilmuan, sedangkan pengembangan horizontal mengacu pada keterkaitan dan relevansi antar bidang keilmuan; 3). Pendidikan tinggi hendaknya jangan semata-mata hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja. Tetapi lebih jauh dari itu harus memperkuat kemampuan dasar mahasiswa yang memungkinkan untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global; 4). Pendidikan nasional perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan dalam kelas belajar atas dasar kemampuan akademik; 5). Pengembangan sekolah perlu menggunakan pendekatan *community based education*. Dalam model ini,

sekolah dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan potensi yang ada didalam masyarakat itu sendiri; 6). Untuk menjaga relevansi *outcome* pendidikan, perlu diimplementasikan filsafat rekonstruksionisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praksis pendidikan. Dengan berorientasi pada filsafat ini, pendidikan akan mampu merekonstruksi berbagai bentuk penyakit sosial, dehumanisasi, mental dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya akan dapat ditanamkan sikap-sikap toleransi etnis, rasial, agama, dan budaya dalam konteks kehidupan yang kosmopolis dan plural (Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000: 13).

Ketiga, manajemen dan anggaran harus tepat guna dan sesuai guna, strateginya; 1). Perguruan tinggi perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan *accountability quality assurance*. Dengan prinsip ini pada akhirnya perguruan tinggi harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, orang tua, mahasiswa, maupun pemerintah; 2). Manajemen pendidikan sekolah dasar hendaknya berada dalam satu sistem agar terjadi efisiensi administrasi dan efisiensi pembinaan akademik para guru; 3). Pendidikan tinggi hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel dan dinamis agar memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan tuntutan eksternal yang dihadapinya; 4). Pengembangan akademik di perguruan tinggi perlu fleksibilitas yang tinggi agar tercipta

kondisi persaingan akademik yang sehat; 5). Guru dan dosen harus diberdayakan secara sistematis dengan melihat aspek-aspek, antara lain: kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, dan perlindungan profesi; 6). *School Based Management* perlu dikembangkan dalam kerangka desentralisasi atau devolusi pendidikan, agar lembaga-lembaga pendidikan dapat mempertahankan akuntabilitasnya terhadap *stake holder* pendidikan nasional; 7). Pendidikan hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan. Untuk itu, perlu ada peningkatan anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25% dari APBN yang sedang berjalan. Karena anggaran pendidikan di Indonesia sangat rendah sehingga tidak mampu untuk mendukung berbagai inovasi di bidang pendidikan (Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000: 11-13).

Usulan-usulan reformasi pendidikan nasional tersebut, apabila dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, mendasar dan perlu ada realisasi yang nyata, maka bangsa Indonesia siap untuk memasuki milenium ketiga. Sebab fondasi dan pilar-pilar pendidikan yang dibangun akan mampu berdiri kokoh menghadapi badai dan gelombang sebesar apa pun yang akan terjadi. Maka, untuk mengantisipasi perubahan dan langkah-langkah yang diusulkan pada pendidikan Islam tersebut, menurut hemat penulis,

pendidikan Islam perlu dipersiapkan dengan melakukan terobosan pemikiran kembali suatu konsep pendidikan Islam yang baru yang dapat menjawab tantangan dan perubahan era global.

Agar adanya pemahaman yang integratif rasional aposteriori dan pemahaman integratif rasional transendental sebagai paradigma ilmu yang mengintegrasikan wawasan ilmu dengan wawasan agama (Noeng Muhajir, 2001: 102). Untuk masa depan, pendidikan Islam haruslah dijiwai nilai-nilai aqidah dan moral humanisme qur'ani dan diterapkan pada semua strata dan jenjang serta jenis pendidikan. Asumsi dasarnya adalah bahwa nilai-nilai humanistik yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul memiliki sifat yang unggul kompetitif secara universal terhadap nilai moral-humanistik yang sekarang diterapkan secara universal. Sistem pendidikan Islam dapat pula dibangun dari sejumlah teorisasi tertentu. Teori fitrah atau watak dasar *a good active* dapat menjadi postulasi pertama ilmu pendidikan yang Islami. *Buištu li utamimma makârimal akhlaq* dapat menjadi postulasi kedua. Amar ma'ruf nahi mungkar dapat menjadi postulasi ketiga. Keteladanan dapat menjadi postulasi keempat. Kontruksi logikanya handaknya digunakan kalkulus probalistik bukan kalkulus jenis.

Pendidikan Islam perlu dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat. Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan dengan mewujudkan visi dan misi baru. Karena apabila kita ingin melakukan perubahan

pendidikan Islam menuju masyarakat global pada milineum ketiga harus mempunyai visi yang jelas, yaitu visi yang sesuai dengan konstitusi ialah mewujudkan hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat yang dicita-citakan" (H.A.R. Tilaar, 1999: 4). Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan yang terjadi (Azyumardi Azra, 1999: 57). Maka, pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional, juga ikut mengalami perubahan politik bangsa pada era reformasi ini dituntut untuk merumuskan kembali visi pendidikan Islam yang baru untuk mewujudkan perannya yaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Islam Indonesia.

Pembaruan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat *obsolescence* dari program pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam sistem produksi dapat mengembangkan teknologi dengan kecepatan yang amat tinggi karena ia harus bersaing dengan pasar ekonomi secara global, sehingga perhitungan efektivitas dan efisiensi harus menjadi pilihan utamanya (Suyanto dan Hisyam, 2006: 17). Tetapi sebaliknya disisi lain, "dunia pendidikan tidak dapat dengan mudah mengikuti perkembangan

teknologi yang terjadi di masyarakat sebagai akibat sulit diterapkannya perhitungan-perhitungan ekonomi yang mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap semua unsurnya. Tidak semua pembaruan pendidikan dapat dihitung atas dasar efisiensi dan untung rugi karena pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi kemanusiaan.

Keadaan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan pembaruan. "Tujuan pembaruan itu akhirnya ialah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya (Suyanto dan Hisyam, 2006: 18). Tetapi pada kenyataannya sampai kini, "pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter, tidak humanis dan memperbodoh rakyat banyak (H.A.R. Tilar, 1998: 26). Kenapa demikian, karena sistem pendidikan pada era Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasinya yang cukup baik di bidang pendidikan. Kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif nampak kita rasakan selama Orde Baru Berkuasa, mungkin sampai saat reformasi sekarang ini (Suyanto, 1999: 3).

Pada sistem pendidikan Orde Baru, ada tiga ciri utama yang dapat dicermati di dalam pendidikan nasional kita sampai sekarang ini. "*Pertama*, adalah sistem yang kaku dan sentralistik; yaitu suatu sistem yang terperangkap di dalam kekuasaan otoritas pasti akan kaku sifatnya. Karena ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat, telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. *Kedua*, sistem pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme dan konseisme (*cronyism*). *Ketiga*, sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktek-praktek memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (H.A.R. Tilaar, 2006: 28). Di samping itu, sistem pendidikan kita sekarang ini belum mengantisipasi masa depan dan perubahan masyarakat (Ahmad Tafsir, 2005: 7).

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi hal yang sama, Karena pendidikan Islam termasuk sub-sistem pendidikan nasional, juga terdesain mengikuti budaya dan politik bangsa yang dibangun pada masa Orde Baru. Sehingga gambaran pendidikan kaku, kurang kreatif, dan melahirkan manusia yang brutal (tidak humanis) juga bisa terjadi pada pendidikan Islam, apalagi secara intern pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan dalam berbagai aspek yaitu persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, dan manajemen

pengelolaan. Memang patut diakui, upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan humanisme pendidikan (Islam) sangat penting bagi manusia, karena pendidikan yang memanusiakan manusia adalah sarana untuk menjadikan manusia lebih baik dan bijak. Paling tidak dapat menjadikan dirinya menuju ke arah yang lebih baik, serta mampu memahami hakikat dirinya, bagaimana dia berperan sebagai manusia dan memanusiakan manusia. Muara dari humanisme pendidikan pada dasarnya menjadikan individu (manusia pembelajar) mampu mendidik dirinya, kemudian mampu mengajarkan dan mendidik peserta didiknya dengan cara-cara yang manusiawi.

Pemberian hukuman dengan kekerasan hanya akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikis peserta didik. Pemberian hukuman tersebut juga tidak akan menimbulkan efek jera. Bahkan dapat menimbulkan kebencian yang berbuntut pada rasa dendam. Jadi tak menutup kemungkinan, maraknya tawuran antar peserta didik dewasa ini akibat dari akumulasi kejengkelan mereka. Sehingga emosi peserta didik akan mudah tersulut dan berkobar.

Penciptaan iklim humanis dalam pendidikan mutlak dilakukan, dan harus melibatkan semua

komponen pendidikan, mulai dari sistem, para birokrasi pendidikan, *policy maker*, *stakeholder* pendidikan, dewan guru, kurikulum hingga peran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan wajah pendidikan di Indonesia lebih humanis dan selanjutnya target/tujuan pendidikan dapat tercapai, sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat manusia Indonesia secara utuh.

Saran

Para guru, pemangku kepentingan (*stakeholder*), aparaturnya pemerintahan dan pemerhati pendidikan diharapkan dapat menyemaikan model pendidikan humanis. Dimana manusia satu dan yang lainnya saling menghargai, asih, asah, asuh, demi terwujudnya tujuan pendidikan. Kaitannya dengan hal itu, diharapkan para pengkaji, peneliti dan pemerhati pendidikan senantiasa mampu menghasilkan karya penelitiannya dibidang pendidikan humanis. Kajian tersebut, tentunya nantinya dapat digunakan sebagai alternatif solutif mengatasi kekerasan dibidang pendidikan. Di sisi yang sama, warga masyarakat, khususnya para orang tua harus dapat mendidik dan mengajarkan perilaku humanis disetiap lini kehidupan. Baik dalam bertutur, bersikap dan bertindak. Dengan begitu, generasi muda dapat “terlahir” menjadi manusia yang berbudaya, beradab dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi, Kasus dan*

Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Azra, Azyumardi.1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu.

Budayawan, Wawan. 2008. *Dehumanisasi Pendidikan*. (<http://www.bali-travelnews.com/>, 2 Maret, 2008).

Danim, Sudarman. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dawam, Ainurrofiq. 2003. *Emoh Sekolah; Menolak “Komersialisasi Pendidikan” dan Kanibalisasi Intelektual”, Munuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press.

Djamaluddin, Ancok. 1998. *Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Manusia di Milenium Ketiga*. Yogyakarta: UII.

F. Moes, Matthew. 2009. *Creating Islamic Culture in Muslim Schools*. Capella University from <http://www.zaytuna.org>.

Mansur Isna. 2001. *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta, Global Pustaka Utama.

Mukodi. 2010. *Pendidikan Islam Terpadu Reformulasi Pendidikan di Era Global*. Yogyakarta: Magnum.

- 2011. *Mendialogkan Pendidikan Kita: Sebuah Antologi Pendidikan*. Yogyakarta. Magnum.
- Sugiharto, Bambang. 2008. *Humanisme dan Humaniora Relevansinya bagi Pendidikan*. Yogyakarta, Jalasutra.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suyanto, Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, Makalah: Seminar Nasional "Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga. Yogyakarta: ISPI dan Primagama, 9 November 1999.
- Tafsir, Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera.
- 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Globalisasi Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.